



Partnership for Democratic Local Governance in South-East Asia www.delgosea.eu

National Workshop on Policy Recommendation and Country Strategy
17th April 2012

"The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders".

The European Commission is the EU's executive body.



This project is co-funded by the
European Union



DELGOSEA Project Overview

Proyek DELGOSEA (www.delgosea.eu)

The Partnership for Democratic Local Governance in Southeast Asia
(DELGOSEA)

- ... adalah **jaringan transnational** antara aktor non-pemerintahan, Asosiasi Pemerintah Daerah, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil
- ...untuk **replikasi kisah sukses (praktik-praktik terbaik) pada pemerintahan lokal** antara kota-kota di kawasan Asia Tenggara (fokus wilayah: Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam)



Informasi Umum...

- Dana: Komisi Eropa, Konrad-Adenauer-Stiftung
- Durasi proyek: 30 bulan (1 Maret 2010-31 Agustus 2012)
- Mitra: Local Government Development Foundation (LOGODEF), Thailand Environment Institute (TEI), United Cities and Local Governments for Asia and Pacific (UCLG-ASPAC), Association of Cities of Vietnam (ACVN), National League of Communes/Sangkats of the Kingdom of Cambodia (NLC/S).
- Pemangku Kepentingan Utama: 10 Asosiasi Pemerintahan di Asia Tenggara
- Indonesia: APEKSI, ADEKSI, ADKASI, APKASI



Tujuan dan Visi

Tujuan kami:

Untuk menciptakan dasar yang berkesinambungan untuk pertukaran praktik terbaik pada pemerintahan daerah di Asia Tenggara dalam rangka meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat

Visi kami:

Perluasan jaringan batasan-batasan DELGOSEA ke kota-kota lain di Indonesia dan diluar Indonesia. Sejauh ini DELGOSEA terbatas pada 16 kota pilot di Asia Tenggara



Sekilas mengenai Praktik terbaik dan Kota Pilot

- ✓ dari 16 BP, 3 BPs dari Indonesia (Solo, Kartamantul, Yogyakarta).
- ✓ Kota pilot di Indonesia mengambil BP dari Thailand dan Filipina



Catatan umum

- DELGOSEA adalah proyek peningkatan kapasitas bertujuan melengkapi dan mendukung asosiasi pemerintahan (LGAs) dan kota pilot selama proses replikasi.
- Kepemilikan replikasi BP adalah kota pilot (!). Tanggung jawab pelaksanaan setelah Agustus 2012: kota pilot harus memimpin proses replikasi.
- DELGOSEA telah melengkapi para coach yang mendukung kota pilot selama proses replikasi: tidak bekerja penuh waktu di proyek OKI SDM dari kota pilot sangat dibutuhkan
- POKJA



Kegiatan

February-April 2011

↓
Pembuatan Transfer Concept dan Action Plans (activity 9)

Mei-Juni 2011

↓
Pelatihan Stakeholders Lokal di Kota Pilot (activity 10)

Berdasarkan penilaian kebutuhan, pelatihan untuk mendukung replikasi BP.

Mei – Juli 2011 seterusnya

↓
Pertukaran kunjungan antara kota BP dan kota pilot (activity 12)

Juni 2011 seterusnya

Mulai replikasi BP

Juni 2011 seterusnya

↓
Monitoring dan Konsultasi selama replikasi BP (activity 11)



Activities

↓

Akhir August 2011 seterusnya

Kunjungan Evaluasi External ke Kota Pilot

↓

Akhir September 2011

Konferensi Midterm Review (Batam)

Tujuan: pertukaran tantangan BP antara lima negara proyek; review proses replikasi; presentasi hasil evaluasi.

Peserta: LGAs, kota pilot, coaches, pakar international

↓

September 2011 seterusnya

Update transfer konsep dan perencananaan (jika dibutuhkan)

Transfer konsep harus selalu di review dan di update jika dibutuhkan

Note: pelaporan/dokumentasi proses replikasi tersedia di website DELGOSEA



Workshop Overview

- **Sesi 1**

- Rekomendasi Kebijakan
- Masukan dari kota pilot dan kota BP terhadap rancangan rekomendasi kebijakan
- Tanggapan dan masukan dari perwakilan pemerintah terhadap rekomendasi kebijakan
- Diskusi diarahkan oleh moderator

- **Sesi 2**

- Road Map – Country Strategy Indonesia
- Presentasi pencapaian DELGOSEA, jaringannya, rencana ke depan
- Diskusi mengenai keberlanjutan
- Rangkuman hasil yang dicapai
- Penutup



Poin – poin Rekomendasi Kebijakan

Tantangan Replikasi Praktik Terbaik Kota Percontohan

Pangkalpinang

- Pelestarian lingkungan, pemetaan laut, dan penzanaan laut perlu dilakukan sesegera mungkin

Kupang

- membutuhkan sumber daya tambahan (dana, fasilitas pengolahan limbah, dll)
- partisipasi masyarakat

Wakatobi

- Upaya bersama untuk menangani sampah kiriman dari luar Wakatobi.
- Upaya konservasi telah dilakukan tetapi terhalang oleh masa jabatan Walikota.

Tarakan

- Tidak memiliki peraturan lokal yang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan dan pemisahan limbah untuk mereplikasi proyek eko-saver dari kota Marikina.
- UU No 18/2008 tentang pengelolaan limbah dan UU 32/2009 tentang lingkungan tidak dilengkapi dengan peraturan pemerintah sebagai pedoman operasional bagi pemerintah daerah dan masyarakat.



Poin – poin rekomendasi kebijakan

Rekomendasi Kebijakan

- Kerjasama dan Koordinasi dalam Penggunaan Sumber daya Laut
Sebagai negara maritim, kerjasama dan koordinasi dalam penggunaan sumber daya laut sangat penting bagi Indonesia, khususnya dalam hal peraturan.
Tidak hanya penggunaan di wilayah teritori Indonesia, tetapi juga semua sumber daya yang terkandung didalam laut.
- Pelestarian Lingkungan untuk Pengelolaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi Secara berkelanjutan



Poin – poin rekomendasi kebijakan

- **PEMERINTAH DAERAH PERLU NSPK??**

Dalam peraturan Pemerintah No. 38/ 2007 (PP.38/2007), masalah lingkungan merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah (bag.7) tetapi harus mengikuti Norma, Standard, Prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- **Exploitasi hutan liar**

- Semua kota percontohan khususnya Kupang, memerlukan adanya pelestarian lingkungan, termasuk pemisahan limbah yang tepat, penanganan limbah cair, pengelolaan limbah padat dan proses daur ulang yang direkomendasikan di Tarakan
- Limbah industri tidak memiliki proses tingkat bahaya yang tinggi, tetapi jumlah limbah sendiri tidak boleh diremehkan. Tanpa penanganan yang tepat dan penegakan hukum, banyaknya industri dan penduduk akan memperburuk polusi laut. Jika ditangani dengan tepat, industri daur ulang dapat memberikan sumber pendapatan dari retribusi limbah dan produk daur ulang.



Poin – poin rekomendasi kebijakan

- **Siaga Bencana and Manajemen Pasca Bencana**

- Pemerintah patut mempertimbangkan untuk memasukkan Bencana Alam ke dalam pengembangan perencanaan Pemerintah Daerah.
- Sudah ada perencanaan nasional pemerintah pusat terkait bencana?
- Selain upaya pencegahan, membangun pusat pengungsi pada lokasi yang aman dari bencana, atau untuk situasi ekstrim, distribusi pemukiman dan wilayah bisnis patut dipertimbangkan.

- **Pengembangan Kapasitas**

- Pengembangan kapasitas Pegawai Negeri, disertai dengan pemberian penghargaan dan sistem insentif yang sesuai. Sudah ada system reward dan punishment?
- Kalau ya, apakah berjalan baik? Perlu membuat peraturan nasional mengenai hal tersebut?
- Keterlibatan Masyarakat
- Semua rekomendasi diatas membutuhkan usaha yang besar, yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah lokal maupun nasional. Keterlibatan masyarakat dalam segala bidang merupakan suatu keharusan, tidak hanya selama proses perencanaan, tetapi lebih penting lagi pada tahap pelaksanaan.



Poin – poin rekomendasi kebijakan

- ***Perbaiki Kerangka Politis dan Kerangka Kerja Resmi***
- *Jangka waktu pemerintahan Kepala Daerah:*

memperpanjang batas maksimum tiga periode berturut-turut dapat membantu memastikan kemajuan pembangunan.
- *Perlu adanya hukum desentralisasi bersamaan dengan revisi sistem transfer fiskal untuk memberikan porsi yang lebih besar terhadap investasi dan pengembangan anggaran.*
- Sehubungan dengan Hukum Kelautan, merancang Perencanaan Tata ruang Kelautan sama pentingnya dengan perencanaan Tata Ruang Lahan, hal ini dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan antara berbagai pihak terkait kelautan (perikanan, pertambangan, transportasi, pariwisata, dll).

Memasukkan kota-kota percontohan kedalam peraturan dan hukum patut dipertimbangkan untuk membantu pengembangan pemerintah lokal.